

Hasil Survei Politik dan Partisipasi Mahasiswa Dalam Pemilihan Umum

Syifa Nandiny¹ Ronni Juwandi²

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia^{1,2}
Email: nandinysyifa@gmail.com¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan persepsi mahasiswa terhadap hasil survei politik dalam konteks peningkatan partisipasi pemilu. Menggunakan penelitian kombinasi (*mixed method*) dengan metode kuantitatif-korelasional sebagai metode primer. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa aktif jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Untirta, Universitas Primagraha dan Universitas Banten Jaya. Sampel dari responden penelitian ini sebanyak 91 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *proporsional sampling*. Perhitungan validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS versi 26, sedangkan tingkat persepsi diukur melalui pengukuran dengan interpretasi nilai χ dalam skala *guttman*. Temuannya menunjukkan interpretasi tidak sesuai dengan persentase 47,25% atau 47%. Hasil ini menyoroti preferensi alternatif para mahasiswa dalam upaya peningkatan partisipasi pemilu adalah penggunaan media sosial yang digaungkan sebagai preferensi utama para mahasiswa yang merupakan bagian dari pemilih generasi muda. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman dalam memperkaya hasil penelitian yang telah ada mengenai kajian politis partisipasi dan keterlibatan pemilih dalam konteks Pemilu.

Kata Kunci: Persepsi, Lembaga Survei Politik, Pemilu



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam perwujudan kajian demokrasi, setiap kelompok masyarakat harus berpartisipasi dalam proses pembuatan dan penetapan kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan harus dilibatkan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Sehingga dengan demikian sistem politik dapat dikembangkan dan memuaskan keinginan dan harapan setiap warga negara (Saiin, 2020). Kegiatan pemilihan dalam konteks otoritas publik dianggap lebih demokratis. Oleh karena itu, pemilihan umum langsung oleh rakyat merupakan salah satu pilihan yang digunakan untuk meningkatkan proses seleksi dan kredibilitas pemilihan pejabat publik. Dalam kehidupan sosial suatu bangsa, tidak semua warga negara pada dasarnya setara. Hak dan kewajiban berbeda dan semuanya setara di hadapan hukum dan pemerintah. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk berpartisipasi dalam politik, berpartisipasi dalam berekspresi, dan melakukan amandemen terhadap pemerintahan.

Adanya pergantian kepemimpinan merupakan bagian yang tidak bisa dihindari dalam sistem demokrasi dan memerlukan partisipasi masyarakat. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, persoalan partisipasi merupakan hal yang kompleks. Partisipasi merupakan ukuran penerimaan terhadap sistem politik yang dibangun suatu negara. Kemajuan dan perkembangan pembangunan suatu negara sangat bergantung pada upaya masyarakatnya, tanpa membedakan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan (Saiin, 2020). Partai-partai politik bersaing untuk mendapatkan hati masyarakat, tokoh lama dan baru bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, dan lembaga-lembaga survei bermunculan menjamur. Perubahan sistem pemilu langsung pada tahun 2004 membuat kehadiran jajak pendapat semakin menarik. Terutama dalam menentukan kekuatan dan peluang kandidat untuk berpartisipasi dalam debat politik. Lembaga

survei dapat melakukan survei sebelum pemilu (pra pemilu), selama fase pemilu (pada waktu pemilu), dan setelah pemilu (tabulasi cepat atau *exit poll*).

Kegiatan survei sebelum pemilu atau biasa disebut *pra election* berfungsi sebagai strategi bagi partai politik untuk memperkenalkan nama kandidatnya karena membantu menentukan kandidat mana yang paling berpeluang menang. Sebaliknya pada tahap pemungutan suara (pemilu), dilakukan survei untuk mengetahui tingkat elektabilitas calon (Putri, 2020). Dinamika pemungutan suara di Indonesia tidak terlepas dari apa yang selama ini disampaikan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan hasil pemungutan suara. Pada pemilu 2014 contohnya, persaingan antar lembaga survei semakin ketat. Perjuangan untuk mengumumkan hasil pemilu diperburuk dengan banyaknya manfaat praktis yang dapat membantu kandidat mendapatkan dukungan, popularitas, dan akses di kalangan pemilih. Setelah itu, harus diakui perjalanan lembaga survei menimbulkan kontroversi. Dalam beberapa kasus, kehadiran dan perang antar lembaga survei dilaporkan turut berkontribusi pada meningkatnya persaingan dan kompetisi antar kandidat. Bahkan lembaga survei politik kini cenderung menjadi organisasi bisnis yang partisan (Surokim, 2018).

Terdapat bukti nyata dan tak terbantahkan mengenai mengapa independensi lembaga pemungutan suara politik perlu dipertanyakan. Kesatu, sebagian besar lembaga survei berfungsi sebagai konsultan dan kandidat pemenang. Kedua, hasil publikasi penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan dan signifikan antar institusi. Ketiga, terdapat banyak lembaga survei yang bekerja untuk partai dan dikelola oleh politisi dan simpatisan partai. Keempat, meskipun nama lembaga penelitian berganti nama secara silih berganti, namun stafnya tetap sama dan tidak mengalami perubahan (Surokim, 2018). Secara konseptual, ada dua strategi yang digunakan lembaga survei dalam penelitian, khususnya di bidang ilmu politik. Kedua hal tersebut adalah *bandwagon effect* dan *underdog effect*. *Bandwagon effect* merupakan fenomena dimana pemilih memilih kandidat atau partai yang diharapkan menang. Sebaliknya, *underdog effect* adalah fenomena dimana pemilih memilih kandidat atau partai yang diperkirakan akan kalah. Strategi ini digunakan dalam banyak jajak pendapat untuk menarik dan mendukung opini publik (Putri, 2020).

Pada pembahasan RUU Pemilu terakhir DPR, salah satu topik pembahasan adalah soal aturan mengenai pengumuman hasil jajak pendapat masyarakat. Perdebatan di kalangan pejabat terpilih telah menimbulkan kekhawatiran mengenai apakah diumumkannya hasil survei akan mempengaruhi perilaku memilih individu atau komunitas tertentu. Berbagai penelitian dan pemberitaan menunjukkan bahwa generasi muda berperilaku tidak konsisten atau bertentangan dengan ekspektasi tinggi yang diberikan kepada mereka. Hal ini mencakup kurangnya minat dan pengetahuan mengenai politik dan kebijakan publik, ketidakpercayaan terhadap aktivitas pemerintah, dan rentannya generasi muda terhadap pandangan keagamaan yang dinilai memiliki paham ekstrem. Temuan ini tentu saja memprihatinkan, mengingat partisipasi politik kaum muda mungkin mencerminkan partisipasi politik para generasi muda di kemudian hari. Dalam kenyataan nya, kehidupan demokrasi yang sehat memerlukan partisipasi politik (BNPT, 2019). Sehingga, perlu dipertanyakan kembali bagaimana persepsi mahasiswa terhadap hasil survei politik dalam konteks peningkatan partisipasi pemilu khususnya dalam kajian partisipasi dan kepercayaan politik bagi mahasiswa yang merupakan bagian dari golongan pemilih pemilu? Apakah hasil publikasi lembaga survei politik dapat meningkatkan partisipasi politik warga negara menurut pandangan mahasiswa tersebut?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah *mixed methods* dengan desain *concurrent embedded* (campuran tidak seimbang). Menurut (Sugiyono, 2019) *concurrent embedded* (campuran tidak seimbang) adalah metode penelitian yang menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan

kualitatif dalam proporsi yang tidak seimbang. Dalam hal ini peneliti mengambil metode penelitian kombinasi (*Mixed Method*) dengan desain penelitian campuran tidak seimbang (*concurrent embedded*) dengan metode kuantitatif-korelasional sebagai metode primer dan studi literatur sebagai metode sekunder. Populasi yang digunakan adalah seluruh Mahasiswa Aktif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Banten Jaya dan Universitas Primagraha dengan jumlah populasi sebesar 801 mahasiswa. Populasi adalah suatu wilayah umum yang terdiri atas objek dan subjek yang besaran dan karakteristiknya dipilih peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019).

Teknik pengujian sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat *margin of error* 10%. Dimana sampel penelitian ini adalah sebanyak 88,90 (digenapkan menjadi 89) yang diperoleh dalam perhitungan rumus *Slovin*. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dengan menggunakan skala *guttman* yang terdiri dari pernyataan positif dan negatif yang disebar secara digital menggunakan *google form* dalam format pilihan ganda dan pengumpulan data kualitatif yakni menggunakan analisis studi literatur. Teknik pengambilan anggota sampel dengan menggunakan teknik *proporsional sampling*. Dalam teknik ini pengambilan anggota sampel dari populasi ditentukan jumlah masing-masing sampel tersebut dengan tingkatan mahasiswa yang tersebar di beberapa Jurusan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ada di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Universitas Banten Jaya dan Universitas Primagraha (Wirachandra, 2023). Perhitungan validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS versi 26, perhitungan validitas dibandingkan dengan *r* tabel pada signifikansi 5% dengan jumlah responden (*n*)= 91. Dari 91 responden tersebut, frekuensi nya terbagi menjadi jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (46,2%). Diikuti oleh mahasiswa dari Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Primagraha (28,6%) dan mahasiswa Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Banten Jaya (25,3%). Responden berasal dari angkatan 2020 sampai 2023. Analisa data dalam pengukuran presentase tingkat persepsi menggunakan hasil interpretasi nilai *x* pada skala *guttman* (Kasim, 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Persepsi, tindakan dan sikap individu yang mengarah pada tujuan ditentukan oleh nilai dan preferensi (pilihan). Hal ini merujuk pada konsep rasionalitas terhadap karakteristik manusia hal ini adalah konsep dasar yang awalnya digunakan Weber untuk mengklasifikasikan perilaku sosial untuk menemukan karakteristik pilihan masyarakat dalam pengambilan keputusan (Putri & Sari, 2020). Perilaku rasional memperhitungkan keputusan sadar yang dibuat oleh individu. Tindakan yang dilakukan oleh agen juga merupakan bagian dari karakteristik aktor dan mempengaruhi karakteristik pengambilan keputusan individu. Adapun tujuan penggunaan teori ini adalah untuk melihat dan mengetahui karakteristik pemilih yang menjadi tolak ukur penggunaan teori tersebut dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti mempelajari karakteristik pilihan politik pemilih melalui karakteristik pilihan rasional, responsif, reaktif, dan aktif (Putri & Sari, 2020). Saat ini, para pembuat kebijakan semakin sadar akan bahaya demokrasi yang muncul dari penyebaran disinformasi melalui media sosial dan radikalisasi di ruang gema. Dalam konteks ini, pemahaman yang komprehensif tentang dampak jajak pendapat terhadap pemilih sangat penting untuk menghindari polarisasi ekstrem di dalam pemilih dan untuk melindungi dari manipulasi opini publik (Mike F, 2021).

Pada penelitian ini, variabel *X* nya menghasilkan persepsi mahasiswa terdiri dari empat indikator yakni: karakteristik pemilih rasional, karakteristik pemilih reaktif, karakteristik pemilih responsif, karakteristik pemilih aktif. Skor aktual tertinggi dalam penelitian ini berisikan pernyataan positif yakni "saya sebagai pemilih akan memprioritaskan kualifikasi latar

belakang pendidikan kandidat pasangan calon" dalam pernyataan ini frekuensi jawaban sejumlah 65.9% responden menjawab "ya". Selanjutnya indikator karakteristik pemilih reaktif, skor tertinggi berada pada butir soal nomor 14 (skor aktual 58) berisikan pernyataan positif yakni "saya sebagai pemilih memiliki opini bahwa *attitude* atau cara bersikap setiap kandidat pasangan calon menjadi penting sebagai pertimbangan dalam menggunakan hak pilih" dalam pernyataan ini frekuensi jawaban sejumlah 63.7% responden menjawab "ya". Hal tersebut sesuai dengan pendapat menurut (Putri & Sari, 2020: 60) yang menjelaskan bahwa kecantikan, ketampanan, tinggi dan berat badan calon pasangan sebagai kualifikasi pemilihan dan kriteria pemungutan suara yang mereka tetapkan. Hal ini tidak menjadi tolok ukur bagi responden karena penampilan seseorang dianggap bukan menjadi tolak ukur mampu atau tidaknya para kandidat pasangan calon akan mewujudkan dan menjalankan amanah yang diperolehnya. Sementara itu, para responden menilai performa calon potensial tidak menjamin keberlanjutan kinerja yang baik dan sesuai.

Sementara itu, karakteristik pemilih responsif terbagi menjadi tiga yakni: memilih dengan kesamaan identitas seperti dorongan dari orang lain, suku dan agama (Putri & Sari, 2020). Dalam penelitian ini, dihasilkan bahwa persentase tertinggi terdapat pada butir soal nomor 19 (skor aktual 58). Pada butir soal nomor 19 berisikan pernyataan negatif yakni "saya sebagai pemilih tidak memprioritaskan kualifikasi kandidat pasangan calon berdasarkan persamaan suku" dalam pernyataan ini frekuensi jawaban sejumlah 63.7% responden menjawab "ya". Hal tersebut sesuai dengan pendapat (Putri & Sari, 2020) yang menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat saat ini sedikit lebih modern dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa responden mewakili sudut pandang beragam mengenai pemimpin. Adapun yang dibutuhkan masyarakat adalah seorang pemimpin yang mampu menjalankan tugas sesuai kinerja dan keterampilannya serta mampu memajukan daerah. Baik di bidang pendidikan, bisnis, pariwisata, maupun kesenian lokal, kandidat pasangan calon tetap eksis tanpa memperhatikan latar belakang suku pemimpinnya. Lebih lanjut, hal ini juga berarti agar pelayanan yang diberikan nantinya dapat sesuai dengan harapan masyarakat yang ada di sekitar. Selanjutnya, karakteristik pemilih aktif. Dalam indikator ini perolehan skor dari penelitian yang telah dilakukan dihasilkan bahwa persentase tertinggi terdapat pada butir soal nomor 28 (skor aktual 58). Pada butir soal nomor 28 berisikan pernyataan positif yakni "saya sebagai pemilih memiliki opini bahwa keputusan untuk memilih kandidat pasangan calon adalah bentuk kebebasan karena berdasarkan keinginan dan preferensi diri sendiri" dalam pernyataan ini frekuensi jawaban sejumlah 63.7% responden menjawab "ya".

Data yang telah diperoleh dari variabel hasil survei politik yang terdiri dari tiga indikator pengetahuan mengenai pemilu, *bandwagon effect* dan *underdog effect*. Dari indikator pengetahuan mengenai pemilu, dihasilkan bahwa persentase tertinggi terdapat pada butir soal nomor 14 (skor aktual 58). Pada butir soal 14 berisikan pernyataan positif yakni "saya memiliki opini bahwa setiap publikasi lembaga survei politik merupakan bagian representatif dari elektabilitas atau kemampuan para kandidat pasangan calon" dalam pernyataan ini frekuensi jawaban sejumlah 64.4% responden menjawab "ya". Hal tersebut sesuai dengan pendapat menurut (Putri, 2020) yang menjelaskan bahwa dalam mempertahankan penilaian dan tindakan yang setara kepada semua orang sehingga jajak pendapat menjadi alat yang mewakili pandangan masyarakat. Hal ini menggambarkan para responden memiliki pandangan bahwa publikasi lembaga survei politik adalah bagian representatif dari setiap elektabilitas dan kemampuan para kandidat pasangan calon di kegiatan pemilihan yang berlangsung.

Indikator *bandwagon effect*, dihasilkan bahwa persentase tertinggi terdapat pada butir soal nomor 25 (skor aktual 51). Pada butir soal 25 berisikan pernyataan negatif yakni "saya sebagai pemilih tidak mempergunakan hak pilih berdasarkan hasil perhitungan akhir kandidat

pasangan calon yang diperkirakan menang" dalam pernyataan ini frekuensi jawaban sejumlah 56.7% responden menjawab "ya". Selanjutnya, indikator *underdog effect* dihasilkan bahwa persentase tertinggi terdapat pada butir soal nomor 30 (skor aktual 57). Pada butir soal 30 berisikan pernyataan negatif yakni "saya sebagai pemilih tidak mempergunakan hak pilih berdasarkan hasil perhitungan akhir para kandidat pasangan calon yang diperkirakan akan kalah" dalam pernyataan ini frekuensi jawaban sejumlah 63.3% responden menjawab "ya".

Variabel X dalam penelitian ini adalah persepsi mahasiswa, dari 50 pernyataan menghasilkan 36 pernyataan yang valid. Sementara itu, variabel Y adalah hasil survei politik, dari 50 pernyataan menghasilkan 41 pernyataan yang valid. Dalam hal ini valid karena instrumen dapat digunakan untuk mengukurnya. Lebih lanjut, suatu instrumen menjadi lebih reliabel jika digunakan berkali-kali untuk mengukur objek yang sama dan menghasilkan data yang sama. Dengan menggunakan instrumen pengumpulan data yang valid dan reliabel diharapkan penelitian menjadi valid dan reliabel. Reliabilitas dari variabel X (persepsi mahasiswa), mendapatkan nilai *cronbach's alpha* sebesar 0.972 yang bermakna tingkat reliabilitas nya sangat tinggi.

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas Variabel X

Cronbach'sAlpha	N of Items
.972	36

Sumber: Peneliti, 2023

Selanjutnya reliabilitas variabel Y (hasil survei politik) mendapatkan nilai *cronbach's alpha* sebesar 0.981 yang bermakna tingkat reliabilitas nya sangat tinggi.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y

Cronbach'sAlpha	N of Items
.981	41

Sumber: Peneliti, 2023

Pengukuran Tingkat Partisipasi

Untuk mengetahui besarnya persentase persepsi mahasiswa terhadap hasil survei politik dalam konteks peningkatan partisipasi pemilu, maka diperlukan perhitungan efektivitas dengan menggunakan metode interpretasi yang tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3. Interpretasi Nilai X

Nilai X	Nilai Interpretasi
0	Tidak Sesuai (TS)
0,01-0,49	Mendekati Tidak Sesuai (MTS)
0,50	Agak Sesuai (AS)
0,51-0,99	Mendekati Sesuai (MS)
1	Sesuai (S)

Sumber: Kasim (2014:1)

Untuk persentase tingkat persepsi dari penelitian ini dapat dihitung dengan menggunakan cara:

Jika jawaban "ya" : 1

Jika Jawaban "Tidak": 0. Jika dikonversikan dalam persentase,

Perhitungan Jawaban "ya" : $1 \times 100\%$

Perhitungan Jawaban "tidak": $0 \times 100\%$ (tidak perlu dihitung).

Sehingga Perhitungan jawaban "ya" dari angket:

Jawaban "ya" rata-rata: $43/91 \times 100\% = 47,25\%$ atau digenapkan menjadi 47%. Adapun jika dalam bentuk nominal yakni 0, 47.

Sehingga bila digambarkan dalam skala: 0%.....47%.....50%.....100%.

Dari analisis Skala *Guttman*, hasil yang diperoleh adalah 47%. Berdasarkan tabel interpretasi terletak pada rentang 0,01 - 0,49 dapat dikatakan tingkat persepsi dalam penelitian persepsi mahasiswa terhadap hasil survei politik dalam konteks peningkatan partisipasi pemilu mendekati tidak sesuai dengan persentase sebesar 47,25% atau 47%.

Pembahasan Studi Literatur

Dilansir dari data Februari 2022 yang dikumpulkan dari situs We Are Social- Hootsuite, sebuah situs web layanan manajemen konten yang menyediakan layanan media online yang terhubung ke berbagai situs jejaring sosial yang berlokasi di Amerika Serikat bahwa proporsi total penduduk Indonesia adalah 277,7 juta jiwa. Ada 191,4 juta pengguna aktif media sosial, terhitung 68,9%. Rata-rata waktu yang dihabiskan dalam menggunakan media sosial di Indonesia adalah 3 jam 17 menit per hari (Audina & Wahyutama, 2023). Dari segi penggunaan dan kepuasan, media sosial terbukti mampu memenuhi motif kognitif, integrasi personal, integrasi sosial, emosional, dan eskalasi yang dimiliki generasi milenial saat mencari informasi politik. Media sosial juga bisa menjadi referensi alternatif dikarenakan media sosial menyediakan informasi yang beragam dan fleksibel untuk digunakan oleh generasi *milenial* (Audina & Wahyutama, 2023).

Popularitas *Tiktok* yang sangat besar di Asia Tenggara menjadikan platform tersebut sebagai wadah terbaru bagi generasi muda untuk mengekspresikan ambisi politiknya. Penelitiannya mengungkapkan bahwa algoritma *Tiktok* unik dan dapat meningkatkan penayangan melalui iklan berkelanjutan. Teknologi ini menjadikan *Tiktok* sebagai wahana aksi politik strategis. Algoritma ini memungkinkan penonton di luar Asia Tenggara untuk terlibat aktif dengan konten tertentu melalui berbagai interaksi dan *like* di *For You Page (fyp)* (Jalli, 2021). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa remaja Indonesia menggunakan *Tiktok* secara langsung. orang secara strategis menggunakan media sosial untuk menyuarakan protes mereka terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang kontroversial. Sebuah video konten yang menampilkan protes masyarakat di Semarang, Jawa Tengah menjadi *viral* di TikTok dengan 1,2 juta suka dan 8,6 juta penayangan. Video tersebut pun mendapat 11.000 komentar yang mendukung aksi tersebut, termasuk dari pengguna *Tiktok* Malaysia. Konten serupa juga tersedia di Thailand dan Myanmar. *Tiktok* mendukung pengunjuk rasa dengan meningkatkan upaya menuntut demokrasi dan diakhirinya kediktatoran militer (Jalli, 2021).

KESIMPULAN

Dalam kehidupan sosial suatu bangsa, tidak semua warga negara pada dasarnya setara. Hak dan kewajiban berbeda dan semuanya setara di hadapan hukum dan pemerintah. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk berpartisipasi dalam politik, berpartisipasi dalam berekspresi, dan melakukan amandemen terhadap pemerintahan. Berdasarkan hasil di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi persepsi mahasiswa maka semakin rendah pengaruh hasil survei politik dalam konteks peningkatan partisipasi pemilu dan memiliki tingkat korelasi yang sangat lemah. Hal ini dibuktikan dengan pengukuran tingkat partisipasi yang menghasilkan interpretasi tidak sesuai dengan persentase 47,25% atau 47%. Berdasarkan penelitian ini, preferensi alternatif para mahasiswa dalam upaya peningkatan partisipasi pemilu adalah penggunaan media sosial yang digaungkan sebagai preferensi utama para mahasiswa yang merupakan bagian dari pemilih generasi muda. Di samping itu, selain mengukuhkan media sosial sebagai preferensi utama para pemilih generasi muda yang dinilai cakap dalam filterisasi informasi yang ada di Internet juga menjadikan sumber alternatif aksesibilitas informasi politik mencakup situs web pemerintah, situs kandidat, pasangan situs berita televisi, situs media cetak, dan portal berita *online*. Lebih lanjut, studi juga menunjukkan bahwa platform *Tiktok*

menjadi platform yang akhir-akhir ini memiliki potensi tinggi dalam menggalang opini, informasi bahkan suara para pemilih muda utamanya mahasiswa terutama mengenai kandidat pasangan calon kedepannya dalam kegiatan pemilihan yakni Pemilu 2024 mendatang. Kritik terhadap penggunaan lembaga survei politik dalam kehidupan bernegara adalah menjadikan penggiatan eksistensi para kandidat pasangan calon dengan berbagai media digital yang relevan dalam penyebaran informasi nya bukan lagi dengan media konvensional. Hal ini dikarenakan mengingat peluang yang signifikan jika beradaptasi dan menggunakan media digital yang relevan terutama pada kalangan pemilih muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Audina & Wahyutama. Media Sosial sebagai Preferensi Sumber Informasi Politik Generasi Milenial. Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 7 Nomor 2, 2023. Diakses pada 30 November 2023.
- Mike Farjam, The Bandwagon Effect in an Online Voting Experiment With Real Political Organizations, International Journal of Public Opinion Research, Volume 33, Issue 2, Summer 2021,
- Pengukuran Skala Guttman Tradisional Revisi, (2014)
- Putri, D. (2020). Pengaruh Hasil Polling Terhadap Pembentukan Opini Pemilih Pemula. Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia Edisi 2, September 2020. Diakses pada 10 Mei 2023
- Putri. P & Sari. M. (2020). Karakteristik Pilihan Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Sidoarjo. JCMS Vol. 5 No. 2.
- Saiin, A. Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Pemilihan Umum Perspektif Good Governance. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau: Edisi Kedua – Juli 2020.
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, hlm 122, 145, 290 dan 291.
- Surokim. Riset Opini Publik Dalam Industri Politik Di Indonesia: Kelembagaan, Publikasi, Peluang, dan Tantangan. Jurnal Untag Surabaya: Vol 1 No. 1, 2021.
- Tiktok, Instrumen Media Sosial Baru dalam Politik (2021)
- Wirachandra, M (2023). Pengaruh Hasil Survei Elektabilitas Calon Bupati Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa Purwasari Kabupaten Tasikmalaya. Skripsi, Universitas Siliwangi.